PERANAN BPUPKI DAN PPKI DALAM MEMPERSIAPKAN KEMERDEKAAN INDONESIA1

Heri Rohayuningsih
SMA N 12 Semarang

Abstract

Unlike neighboring nations who were given independence by the colonial, Indonesia gained independence with the struggle and sacrifice. Not only drops of sweat, tears, sacrifice property, but also sports and the lives of the martyrs nation dedicated to the sacred purpose of independent Indonesia. Thanks to the greatness of soul of the characters and PPKI BPUPKI, Indonesia can achieve its independence on August 17, 1945. Indonesia's independence was at later stages become valuable capital for the nation of Indonesia in Indonesia finalizing an independent state, sovereign, just, and prosperous, and to defend the sovereignty of a foreign power undermining.

Key words: BPUPKI, PPKI, Independence of Indonesia

PENDAHULUAN

Bangsa barat yang pertama kali datang ke Indonesia adalah Portugis. Semula tujuan mereka adalah berdagang dan mencari rempah-rempah. Tahun 1511 mereka menduduki Malaka dan pada tahun 1512 Portugis tiba di Ternate (Maluku). Pada tahun 1521 Spanyol memasuki perairan Maluku dan satu tahun berikutnya Sultan Tidore mengizinkan Spanyol membeli rempah-rempah. Pada tahun 1534 diadakan perjanjian antara Spanyol dan Portugis yang berisi tentang pembagian daerah operasi perdagangan rempah-rempah di perairan Maluku.

Pada tahun 1596 armada Belanda di bawah komando Cornelis de Houtman tiba di Indonesia dan pertama kali singgah di Banten. Tahun 1599 armada Belanda II tiba di Maluku dan untuk menghindari perselisihan antar-armada dagang, para pedagang mendirikan persekutuan dagang bernama Vereenigde Oast Indische Compagnie (VOC) dengan gubernur jenderal pertama Pieter Both. Tahun 1605 VOC berhasil menguasai Maluku dengan menaklukkan Portugis dan sejak itu Belanda menancapkan kuku penjajahan di Indonesia. Karena adanya persoalan kronis, VOC dibubarkan oleh pemerintah Belanda dan Belanda mengambil alih segala kegiatan VOC, lalu Indonesia dijadikan sebagai bagian dari kerajaan Belanda dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlansch Indie). Pada waktu Belanda bermusuhan dengan Inggris dan untuk memperkuat Hindia Belanda diangkatlah gubernur jenderal Herman Willem Daendels. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Hindia Belanda dari serangan Inggris. Untuk kepentingan ini, Daendels memerintahkan pembuatan jalan raya dari Anyer (Jawa Barat) hingga Panarukan (Jawa Timur) sejauh 1000 km.

Tahun 1811 tentara Inggris berhasil mengalahkan Belanda dan berhasil menduduki Batavia. Belanda menyerah kepada Inggris berdasarkan perjanjian Tuntang. Jauh sebelum itu sebenarnya Inggris telah menguasai Bengkulu, Gorontalo dan Minahasa. Pada tahun 1811 hingga 1816 Inggris di bawah pimpinan Sir Thomas Stampord Raffles menjajah Indonesia. Namun dengan ditandatangani konvensi London, Belanda kembali datang ke Hindia Belanda dan melakukan penjajahan kembali. Pada tahun 1819 Van Der Capellen diangkat sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda. Tahun 1830 Van Der Capellen digantikan oleh Van Den Bosch. Tugas gubernur jenderal yang baru adalah mencari uang sebanyak-banyaknya untuk mengisi kas Belanda yang sedang kosong. Untuk mencapai tujuan ini, Van Den Bosch memerintahkan penduduk pribumi melakukan tanam paksa (cultur stelsel). Tahun 1870 sistem tanam paksa dihapus dan diganti dengan sistem ekonomi liberal. Tindakan Belanda menjajah Indonesia dengan sistem yang beraneka ditentang oleh kalangan orang Belanda sendiri seperti Douwes Dekker, Baron Van Hoevel, Van De Putte, dan Van De Venter.

Penjajahan yang dilakukan oleh Portugis, Spanyol, Belanda maupun Inggris membawa penderitaan yang luar biasa pada diri bangsa Indonesia. Kelaparan, kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan merupakan buah pahit dari penjajahan. Karena itulah menimbulkan perlawanan luar biasa gigih dari para tokoh pejuang dan rakyat Indonesia, diantaranya adalah perlawanan rakyat Maluku di bawah pimpinan Pattimura tahun 1817, perlawanan rakyat Sumatera Barat dalam perang Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, perlawanan pangeran Diponegoro di Jawa Tengah pada tahun 1825-1830, perlawanan rakyat Bali (kerajaan Buleleng) di bawah pimpinan I Gusti Ketut Jelantik, perlawanan rakyat Banjar dipimpin raja Banjar pangeran Hidayat dan pangeran Antasari, perlawanan rakyat Batak dipimpin Si Singamangaraja XII, perlawanan rakyat Aceh di bawah komando Teuku Umar, Tengku Cik Ditiro, Cut Nyak Dien, Teuku Daud dan panglima Polim.

Perlawanan yang dilakukan oleh para pejuang tradisional tidak banyak membuahkan hasil karena banyak pemimpinnya yang ditangkap, dibuang, bahkan ada yang dihukum mati, sehingga ketika para pemimpinnya tidak ada, maka perlawanan tidak berlanjut dan mudah dipatahkan oleh penjajah. Itulah sebabnya pada awal abad 20 bentuk perlawanan berubah tidak lagi bersifat fisik kedaerahan, tetapi lebih bersifat organisatoris-nasional. Pembukaan kesadaran nasional diawali dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini dipimpin oleh dr. Sutomo didorong oleh dokter senior yaitu dr. Wahidin Sudirohusodo. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Budi Utomo diantaranya adalah : memajukan bidang pendidikan, memajukan pertanian, peternakan dan perdagangan, memajukan teknik dan ilustrasi, dan menghidupkan kembali kebudayaan. Organisasi nasional lainnya yang turut memberi pencerahan kesadaran nasional adalah Serikat Islam (1912), Indische Partij (1912), Perhimpunan Indonesia (1908), Partai Nasional Indonesia (1927), Partindo, PNI baru, Gerindo (1937), GAPI (1939). Selain itu juga berdiri organisasi non-politik seperti NU, Muhammadiyah, dan Taman Siswa.

Sejarah pergerakan nasional di atas memberikan landasan bagi Indonesia bersatu untuk membebaskan diri dari kekuasaan kolonial. Ikrar para pemuda pada tahun 1928 mematangkan persatuan tersebut dan makin mengkristal pada awal-awal kedatangan bala tentara Jepang menggantikan kolonialisme Belanda yang telah berkuasa lebih dari tiga abad. Tulisan ini hendak mengelaborasi bagaimana peranan BPUPKI dan PPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Uraian diawali dengan topik tentang Sidang BPUPKI dan PPKI, selanjutnya berturut-turut dipaparkan sub-tajuk suasana kebatinan pada saat-saat menjelang proklamasi, arti penting proklamasi kemerdekaan RI, dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan.

SIDANG BPUPKI DAN PPKI

Cita-cita Jepang untuk membangun kawasan Persemakmuran Bersama Asia Timur Raya di bawah naungannya, dicoba direalisasikan dengan mencetuskan Perang Asia Timur Raya yang dipicunya dengan penyerangan mendadak atas pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour pada tanggal 7 Desembar 1941. Sejak itu, gerakan invasi militer Jepang dengan cepat merambah kawasan Asia Tenggara. Philipina (Januari 1942) dan Singapura (Februari 1942) dikuasai, dan selanjutnya giliran Indonesia pada bulan maret 1942 (Sugito,dkk 2005 : 31)

Mula–mula kedatangan tentara Jepang disambut dengan kelegaan, tetapi harapan tersebut musnah sama sekali dengan segala tindakan militer Jepang yang bertangan besi dan sewenang-wenang. Kebebasan rakyat berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan suara terutama untuk membicarakan kemerdekaan dilarang sama sekali. Selama penjajahan Jepang yang relatif pendek ini, yakni tahun 1942–1945, penderitaan rakyat lahir dan batin terasa sekali. Namun hal ini tidak mengurangi semangat kemerdekaan bangsa Indonesia, bahkan dapat dijadikan modal dasar yang sangat besar untuk mengusir penjajahan di bumi pertiwi tercinta (Widjaja 1989 : 5-6)

Pada waktu Jepang menyusun rencana penyerbuannya, ia tidak mengira bahwa Amerika setelah dipukul di Pearl Harbour bisa bangkit kembali dalam waktu begitu cepat. Dalam usahanya menguasai Australia, Jepang terpukul dalam pertempuran laut Karang pada tanggal 7 Mei 1942. Pertempuran ini ternyata merupakan titik balik bagi panah penyerbuan Jepang yang semula dengan capat meluncur dari busurnya. Sejak itu, panah tersebut berbalik arah kembali ke utara (G. Moedjanto 1988 : 83).

Kekuatan Angkatan Laut Jepang dipusatkan di Pulau Truk, di Kepulauan Carolina. Meskipun Angkatan Laut Amerika berhasil merebut pangkalan-pangkalan lain di sekitar Pulau Truk, seperti di Tarawa pada tanggal 1 November 1943, kemudian Kwajelin di Kepulauan Marshall pada tanggal 31 Januari 1944, Pulau Truk tetap dibiarkan saja karena pertahanan Jepang di sana sangat kuat (Muljana 2008 :18)

Bulan Februari 1944 pasukan Amerika berhasil mengusir pihak Jepang dari Kwayalein di Kepulauan Marshall, dan serangan-serangan pengebom B-29 terhadap Jepang dimulai pada bulan Juni. Pada bulan Juli, pihak Jepang kehilangan pangkalan angkatan laut mereka di Saipan (Kepulauan Mariana), yang mengakibatkan terjadinya krisis kabinet di Jepang. Tojo meletakkan jabatan dan Jenderal Koiso Kuniaki menggantikannya sebagai perdana menteri pada tahun 1944 (Ricklefs 1999 : 310)

Bulan September 1944, Angkatan Laut Amerika berhasil merebut pulau-pulau, yang letaknya diantara Filipina dan Truk, sehingga pangkalan laut Jepang di Truk terputus hubungannya dengan pangkalan laut Jepang di Pulau Leyte, Filipina. Dari pulau-pulau dan Kepulauan Mariana, pangkalan laut Jepang di Pulau Truk diserang dengan kapal terbang hingga menyerah dengan jatuhnya pangkalan laut Truk, kekuatan Jepang di Pasifik patah (Muljana 2008 :18).

Kekalahan demi kekalahan dalam perang di Pasifik membuat kedudukan Jepang di Indonesia terancam. Jepang mulai mengambil kebijakan memasukkan kekuatan pribumi. Untuk keperluan tersebut, maka mereka harus bisa lebih memikat rakyat Indonesia. Agar supaya rakyat Indonesia makin bersedia membantu Jepang dengan segala pengorbanannya, maka Perdana Menteri Koiso pada tanggal 7 September 1944 mengucapkan pidato di muka parlemen Jepang yang antara lain menjanjikan pemberian kemerdekaan kepada Hindia Timur (Indonesia) "*dikemudian hari*". Inilah yang dikenal sebagai "*Koiso Declaration*". (G. Moedjanto 1988 : 84)

Tanggal 9 September 1944 lagu kebangsaan Indonesia boleh dinyanyikan kembali dan bendera Sang Merah Putih dapat dikibarkan bersama bendera Jepang yang sejak tanggal 20 Maret 1942 dengan Undang-Undang Nomor 4 telah dilarang. Penegasan janji itu oleh pimpinan pergerakan dinilai sebagai kesungguhan Jepang untuk merealisasi janjinya tentang kemerdekaan Indonesia (Silalahi 2001 : 47)

Pada tanggal 1 Maret 1945 Saiko Syikikan Kumakici Harada, pemimpin pemerintahan Jepang di Jawa mengumumkan akan membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Dokuritsu Junbi Cosakai.

Jatuhnya Kepulauan Okinawa, sebuah pulau Jepang asli yang paling selatan, membuat kabinet Koiso jatuh dan pada tanggal 5 April 1945 digantikan oleh kabinet Suzuki. Kabinet Suzuki yang menggantikannya tentulah tidak bisa segera mengambil alih tanggung jawab pelaksanaan pernyataan Koiso. Namun pada akhirnya datang juga saatnya BPUPKI diumumkan susunannya. (G. Moejanto, 1988 : 84)

Pengangkatan pengurus dan anggota diumumkan tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan HUT Kaisar Jepang, Tenno Haika. Sebagai ketua terpilih dr. KRT Radjiman Wediodiningrat, Ichibangase Yoshio, dan RP Soeroso sebagai wakil ketua, dan 7 orang Jepang lainnya sebagai anggota luar biasa. Kecuali 8 orang Jepang, seluruhnya berjumlah 62 orang (Yunarti 2003 : 3).

BPUPKI dibentuk untuk menyelidiki dan menyusun segala sesuatu rencana mengenai persiapan-persiapan kemerdekaan Indonesia menyangkut segi politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan lain-lain, yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka (Sumarmo 1991 : 70). Secara rinci tugas pokok BPUPKI adalah : (1) menetapkan dasar-dasar Indonesia Merdeka, dan (2) menetapkan Undang-undang Dasar (Silalahi 2001 : 53).

BPUPKI mengadakan dua kali masa sidang, yaitu : masa sidang pertama tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945 dan masa sidang kedua tanggal 10 hingga 16 Juli 1945. Masa sidang I membicarakan Rancangan Dasar Negara Indonesia Merdeka. Pada sidang yang pertama ini, berpidato dan menyampaikan usulan rancangan azas atau dasar negara Indonesia diantaranya adalah Prof. Mr. Moh. Yamin (disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945), Prof. Dr. Mr. Soepomo, Prof. Dr. Moh. Yamin, PF. Dahlan, Moh. Hatta (disampaikan tanggal 31 Mei 1945), Ir. Soekarno, Abikoesno Tjokrosoejoso, M. Soetarjo K, Ki Bagus Hadikusumo, dan Liem Koen Hian (disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945). Usulan-usulan dasar negara tersebut adalah : a) Mr. Mohammad Yamin berpidato dengan judul azas dan dasar negara Republik Indonesia. Dalam pidatonya, beliau mengemukakan 5 (lima) dasar sebagai berikut: (1) Peri Kebangsaan, (2) Peri Kemanusiaan, (3) Peri Ketuhanan, (4) Peri Kerakyatan, dan (5) Kesejahteraan Rakyat. b) Prof. Dr. Mr. Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945 berpidato yang isinya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara: (1) Paham negara persatuan, (2) Perhubungan negara dan agama, (3) Sistem badan permusyawaratan, (4) Sosialisme negara, (5) Hubungan antar bangsa. c) Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 berbicara tentang dasar falsafah negara Indonesia merdeka yang terdiri atas lima asas sebagai berikut: (1) Kebangsaan Indonesia, (2) Internasional atau Peri Kemanusiaan, (3) Mufakat atau Demokrasi, (4) Kesejahteraan Sosial, (5) Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kelima asas yang disampaikan oleh Ir. Soekarno tersebut, atas petunjuk seorang ahli bahasa diberi nama Pancasila yang kemudian diusulkan menjadi dasar negara Indonesia (Kaelan 1999 : 37) Sidang BPUPKI pertama berakhir tanggal 1 Juni 1945 .

Antara sidang resmi pertama dan sidang resmi kedua ada masa reses. Masa reses itu digunakan oleh para anggota untuk membahas Rancangan Pembukaan UUD 1945 yang dipimpin Soekarno. Persidangan ini disebut sebagai sidang tidak resmi dan hanya dihadiri 38 anggota.(Yunarti 2003 : 8) Pertemuan itu dimaksudkan untuk mencari suatu prosedur agar Indonesia dapat secepatnya merdeka. Keinginan untuk secepatnya merdeka itu salah satunya dilandasi alasan bahwa pemerintah bala tentara Dai Nippon dalam waktu yang singkat telah memerdekakan Birma (sekarang Myanmar), Philiphina dan Indi Cina. Tinggal Indonesia sendiri yang belum merdeka. (Silalahi 2001 : 164).

Sidang BPUPKI kedua tanggal 10 – 16 Juli 1945. Hari pertama sebelum sidang BPUPKI kedua dimulai, diumumkan oleh ketua penambahan 6 anggota baru Badan Penyelidik. Ir. Soekarno juga memberi laporan tentang hasil pertemuannya yang dilakukan sejak tanggal 1 Juni 1945. Menurut laporan itu pada tanggal 22 Juni 1945 Ir. Soekarno mengadakan pertemuan antara panitia kecil dengan anggota-anggota Badan Penyelidik bertempat di gedung kantor besar Jawa Hooko Kai. Mereka membentuk panitia kecil yang terdiri atas 9 orang, yang popoler disebut Panitia Sembilan, yang anggotanya adalah sebagai berikut : 1) Ir. Soekarno, 2) Wachid Hasyim, 3) Mr. Moh. Yamin, 4) Mr. Maramis, 5) Drs. Moh. Hatta, 6) Mr. Soebardjo, 7) Kyai Abdul Kahar Moezakir, 8) Abikoesno Tjokrosoejoso, 9) Haji Agus Salim (Kaelan 1999 : 38)

Panitia kecil ini bertugas mencari dan merumuskan formula yang disepakati oleh dua golongan yang ada didalam BPUPKI, yaitu golongan Nasional dan golongan Islam. Mereka merumuskan dan menyepakati bersama yang dikenal dengan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. (Yunarti 2003 : xv)

Beberapa keputusan penting yang patut diketahui dalam rapat BPUPKI kedua adalah pada tanggal 10 Juli mengambil keputusan tentang bentuk negara, tanggal 11 Juli 1945 tentang wilayah negara RI,

Tanggal 11 Juli dibentuk juga Panitia Perancang Hukum Dasar, yang meliputi : panitia perancang hukum dasar dengan ketua Ir. Soekarno, panitia perancang ekonomi dan keuangan dengan ketua Moh. Hatta, dan panitia perancang pembelaan tanah air dengan ketua Abikoesno Tjokrosoejoso. (Pringgodigdo dalam Kaelan :39) Rapat juga memutuskan tentang wilayah Indonesia, panitia perancang HAM, bentuk negara, pimpinan negara dan isi preambul. Pada tanggal 13 Juli, panitia kecil menghimpun usulan mengenai pemegang kedaulatan rakyat, lembaga yang berwenang membentuk UU, tugas pemerintahan, rancangan hukum dasar, dan pembentukan panitia penghalus bahasa. Tanggal 14 Juli, sidang mendengarkan laporan hasil kerja panitia perancang hukum dasar berupa rancangan Indonesia merdeka dan pembukaan hukum dasar. Tanggal 15-16 Juli sidang diawali dengan membicarakan hukum dasar dan penyampaian usul HAM dari Moh. Hatta. Pada tanggal 16 Juli sidang menyetujui dan menerima Rancangan Hukum Dasar yang diajukan oleh panitia perancang hukum dasar (Yunarti 2003 : 29).

Pada tanggal 26 Juli 1945 para pemimpin sekutu di Potsdam mengeluarkan suatu tuntutan agar Jepang menyerah tanpa syarat, tetapi pihak Jepang tidak mau menyerah. Tanggal 6 Agustus bom atom pertama dijatuhkan di Hiroshima yang menewaskan sedikitnya 78.000 orang (Ricklefs 1999 : 314)

Kedudukan Jepang yang terus menerus terdesak oleh sekutu membuat Komando Tentara Jepang di wilayah Selatan mengadakan rapat pada akhir bulan Juli 1945 di Singapura. Disetujui bahwa kemerdekaan bagi Indonesia akan diberikan pada tanggal 7 September 1945, setahun setelah pernyataan Koiso. Pada tanggal 7 Agustus 1945 Jendral Terauchi menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI = Dokuritzu Zyunbi Iinkai) yang bertugas melanjutkan pekerjaan BPUPKI dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan karena akan diselenggarakan pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada bangsa Indonesia. (G. Meodjanto 1988 :85)

Mendengar ucapan itu Soekarno berjanji

akan segera membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang tidak lama lagi akan bersidang. Anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil seluruh Indonesia, yang diangkat oleh pucuk pimpinan Dai Nippon di wilayah Selatan. Tempat bersidang ditetapkan di Jawa. BPUPKI secara resmi dibubarkan pada tanggal 6 Agusus 1945. Pada tanggal 9 Agustus, Soekarno-Hatta pergi ke Saigon untuk bertemu dengan Jenderal Besar Terauchi. Kembali ke Indonesia membawa tiga perintah, yaitu : (1) Soekarno diangkat sebagai ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sedangkan Hatta sebagai wakil ketua, (2) Panitia Persiapan Kemerdekaan boleh mulai bekerja pada tanggal 19 Agustus 1945, dan (3) Cepat atau tidaknya pekerjaan, diserahkan seluruhnya kepada panitia (Muljana 2008 : 22-23).

Panitia Persiapan Kemerdekaan atau Dokuritzu Zyunbi Iinkai itu terdiri atas 21 orang, termasuk ketua dan wakil ketua. Setelah Jepang kalah dalam perang Pasifik/ Perang Asia Timur Raya pada tanggal 14 Agustus 1945, PPKI dijadikan badan nasional dengan menambah anggotanya 6 orang lagi tanpa sepengetahuam Jepang sehingga menjadi 27 orang. Dengan demikian, PPKI bukan lagi merupakan panitia yang dibentuk dan pemberian dari Jepang, tetapi merupakan badan asli bangsa Indonesia sendiri. PPKI telah menjadi badan perwakilan seluruh rakyat Indonesia dan dijadikan wadah perjuangan oleh pemimpin nasional guna mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

PPKI ini semula dimaksudkan sebagai badan yang mempersiapkan penyerahan kekuasaan pemerintahan dari tentara Jepang kepada badan tersebut. Selain ditugasi menyelesaikan dan mengsahkan rancangan UUD dan falsafah negara Indonesia merdeka yang sudah disiapkan BPUPKI, PPKI juga bertugas memusyawarahkan dan menetapkan bagaimana cara pelaksanaan pernyataan atau pengumuman kemerdekaan Indonesia merdeka (Yunarti 2003 : 30).

Sehari setelah pelaksanaan proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang yang pertama dan berhasil mengambil keputusan : 1) Mengesahkan Undang-undang Dasar tahun 1945 sebagai landasan kontitusi yang mengandung landasan idealisme. 2) Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Hatta sebagai wakil presiden. 3) Membentuk Komite Nasional yang bertugas membantu presiden sebelum terbentuknya MPR dan DPR.

Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang kedua dengan hasil: 1) Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 propinsi. 2) Merancang pembentukan dua belas departemen dan menunjuk para menteri-menternya. 3) Membentuk Komite Nasional indonesia Pusat (KNIP) yang bertgas membantu presiden.

Pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang yang ketiga dengan keputusan : 1) Membentuk PNI (Partai Nasional Indonesia) yang dirancang menjadi partai tunggal Negara Indonesia, namun kemudian dibatalkan. 2) Membentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat) berfungsi sebagai penjaga keamanan umum. 3) Membentuk KNI (Komite Nasional Indonesia) sebagai badan yang berfungsi sebagai pusat Dewan Perwakilan Rakyat sebelum pemilu dilaksanakan.

Kemudian, pada tanggal 23 Agustus 1945 Presiden Soekarno mengeluarkan pengumuman yang berisi akan dibentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat), PNI (Partai Nasional Indonesia), KNI (Komite Nasional Indonesia) (Yunarti 2003 : 46-47)

Pada tanggal 23 Agustus, Wakil Presiden Mohammad Hatta memimpin sidang di Gedung Pusat Kebaktian Jawa di Gambir untuk membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, yang didahului dengan pembubaran PPKI. Pelantikan KNIP dilangsungkan pada tanggal 29 Agustus 1945. Struktur organisasi KNIP, yaitu :Ketua: Kasman Singodimedjo, Wakil Ketua I: Sutardjo, Wakil Ketua II : Latuharhary, Wakil Ketua III : Adam Malik, Anggota :berjumlah 136 orang (Muljana 2008 : 47-48).

SUASANA KEBATINAN PADA SAAT-SAAT MENJELANG PROKLAMASI

Pada tanggal 6 Agustus 1945 pihak Sekutu menjatuhkan bom atom dengan panas 50 juta derajat celcius ke kota Hiroshima. Kota hancur lebur, lebih dari 78.000 orang tewas. Bom atom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki. Karena rakyat menderita dan posisi Jepang tidak mungkin lagi untuk melanjutkan perang melawan Sekutu, maka kaisar Jepang memerintahkan perang segera dihentikan. Sekutu menuntut lebih yaitu meminta Jepang menyerah tanpa syarat. Tuntutan diterima, Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945. Ir. Soekarno belum mendengar berita kekalahan Jepang, tetapi sebagian pelajar atau mahasiswa Sekolah Tinggi Kedokteran sudah mengetahuinya dari pemancar gelap. Mereka selalu mengadakan kontak dengan tokoh pemuda revolusioner seperti Wikana, Sukarni, dan Chaerul Saleh. Mereka menginginkan Indonesia segera merdeka setelah tahu Jepang kalah. Untuk itu, mereka telah menyiapkan pasukan untuk mengusir Jepang dan mengambil alih segala posisi yang diduduki oleh Jepang. Tuntutan para pemuda akan kemerdekaan Indonesia sesegera mungkin tidak ditanggapi oleh golongan tua terutama Ir. Soekarno. Menurut Soekarno, kemerdekaan Indonesia tergantung pada hasil sidang PPKI tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno tidak mau mendahului sidang PPKI. Atas desakan para pemuda, Soekarno berusaha menghubungi para pejabat balatentara Jepang tetapi tidak berhasil. Sementara itu, para pemuda yang berkumpul di ruang lembaga bakteriologi (sekarang kantor Fakultas Kesehatan UI) menuntut proklamasi segera diselenggarakan dan berkeinginan agar kemerdekaan yang segera dilaksanakan itu benar-benar lepas sama sekali dari pengaruh Jepang. Para pemuda ingin tanggal 16 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Namun deminkian Soekarno masih bersikeras tidak mau mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Karena khawatir Soekarno masih dipengaruhi oleh Jepang, maka para pemuda mengambil jalan nekad menculik Soekarno dan Hatta dan dibawa ke Rengasdengklok pada tanggal 16 Agustus jam 03.00.

Pada tanggal 16 Agustus jam 16.00 Ahmad Subardjo menjemput Soekarno dan Hatta yang dibawa para pemuda di Rengasdengklok. Pukul 21.00 rombongan Subardjo, Soekarno dan Hatta berangkat menuju Jakarta dan tiba di Pegangsaan Timur pukul 23.00. Soekarno, Hatta, Subardjo dan beberapa tokoh pemuda merancang teks proklamasi kemerdekaan RI di rumah laksamana Maeda. Setelah dilakukan beberapa revisi teks, akhirnya proklamasi kemerdekaan diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 1945 hari jumat jam 10.00 di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks Proklamasi Kemerdekaan berbunyi :

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05
Atas nama bangsa Indonesia,

Soekarno/Hatta

ARTI PENTING PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI

Sejak dikumandangkannya teks Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, maka sejak itu pula negara Indonesia telah berdiri (meskipun masih dalam pengertian ada secara de-facto). Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil jerih payah bangsa Indonesia, bukan hadiah atau pemberian dari Jepang. Dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia atas inisiatif sendiri, atas prakarsa sendiri dan atas kemauan sendiri menentukan nasib sendiri (self-determination) untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan membangun perumahan sendiri yaitu rumah besar Indonesia merdeka. Proklamasi Kemerdekaan mengandung arti adanya pengumuman atau deklarasi kepada bangsa Indonesia sendiri bahwa mereka telah merdeka dan pengumuman kepada pihak luar (negara lain) bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui tetes keringat sendiri yang harus dihargai dan dihormati kedaulatannya.

Ditinjau dari aspek hukum, proklamasi kemerdekaan mengandung arti adanya pernyataan tentang keputusan bangsa Indonesia menghapus tata-hukum kolonial dan menggantinya dengan tata-hukum nasional dengan proklamasi kemerdekaan sebagai norma dasar atau norma pertama yang mendasari berfungsinya negara Republik Indonesia. Secara politis-ideologis, proklamasi berarti bangsa Indonesia telah berhasil melepaskan diri dari belenggu tata-nilai dan kekuasaan kolonial dan membangun kekuasaan nasional berlandaskan pada tata-nilai sendiri, yaitu Pancasila dan UUD 1945.

UPAYA BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN RI

Bung Karno pernah mengatakan bahwa kemerdekaan merupakan jembatan emas, dan melalui jembatan emas itulah akan dibangun Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Meraih kemerdekaan membutuhkan pengorbanan dan perjuangan yang sangat berat. Ketika Indonesia sudah merdeka pun tidak mudah baginya melaksanakan amanat penderitaan rakyat. Belanda yang sejak awal tidak menginginkan kemerdekaan Indonesia, dengan membonceng tentara Sekutu datang ke Indonesia dengan maksud menjajah kembali Indonesia.

Inggris ketika datang ke Indonesia menemui adanya suatu pemerintah yang mampu memelihara ketertiban dan keamanan atas wilayah mereka akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia secara de-facto, namun tentara NICA (Belanda) yang datang menyusul kemudian tidak mengakuinya. Karena Belanda bersikeras ingin menegakkan kembali kekuasaannya atas Indonesia, maka rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadapnya guna menegakkan kedaulatan Indonesia.

Perlawanan-perlawanan rakyat Indonesia terjadi dimana-mana. Di Surabaya terdapat perlawanan rakyat yang diawali dari insiden bendera di hotel Yamato Surabaya. Peristiwa ini kemudian dikenang sebagai insiden bendera di Surabaya. Di Semarang ternyata masih terdapat sisa-sisa kejayaan balatentara Jepang yang masih menampakkan muka kolonialnya dan dipicu peristiwa meninggalnya dr. Karyadi, kepala laboratorium rumah sakit rakyat, rakyat Semarang bertempur habis-habisan melawan kelicikan dan kekejaman tentara Jepang. Peristiwa tersebut kemudian terkenal dengan pertempuran lima hari di Semarang yang biasanya diperingati antara tanggal 10 hingga 15 Oktober 1945. Upaya mempertahankan kemerdekaan RI juga dilakukan di tempat lain, seperti di Ambarawa (terkenal dengan palagan Ambarawa), di Medan (terkenal dengan pertempuran Medan Area), di Surabaya (terkenal dengan pertempuran Surabaya), di Bandung (terkenal dengan Bandung Lautan Api), di Bali (terkenal dengan puputan Margarana) dan masih banyak lagi daerah yang melakukan perlawanan terhadap penjajah yang bermaksud mencabik-cabik kedaulatan Indonesia.

Selain dengan cara perlawanan fisik, bangsa Indonesia juga menempuh jalan diplomasi, yakni melakukan perundingan-perundingan dengan musuh, seperti persetujuan Linggarjati tanggal 25 Maret 1947, persetujuan Renville tanggal 17 Januari 1948, Van Royen-Rum Statement tanggal 7 Mei 1949, dan Konferensi Meja Bundar (KMB) dari tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Meskipun dalam setiap perundingan dengan pihak musuh selalu dikhianati, namun Indonesia tetap mentaatinya dan untuk mempertegas kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, pihak pemerintah melalui para diplomat dan juru bicaranya tiada henti-hentinya mencari dukungan kepada negara-negara dan masyarakat internasional.

PENUTUP

BPUPKI memang buatan Jepang, tetapi segala bentuk aktivitasnya tidak berpihak kepada Jepang, melainkan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tujuannya tiada lain adalah untuk kepentingan Indonesia merdeka. Demikian pula, PPKI semula memang bentukan Jepang, tetapi setelah anggotanya ditambah 6 orang , maka warna keindonesiaannya nampak. Bahkan dengan berdirinya PPKI, tujuan Indonesia merdeka makin mengkristal. Hal ini dibuktikan dengan hasil-hasil sidang yang dilakukan oleh PPKI.

BPUPKI berperan membuat rancangan dasar negara, rancangan UUD RI, wilayah negara (disetujui bahwa wilayah Indonesia adalah Nederlandsch Indie), bentuk negara disetujui kesatuan (unitaris), bentuk pemerintahan Republik, bendera nasional merah putih, dan bahasa nasional adalah bahasa Indonesia.

PPKI berperan memusyawarahkan dan mensahkan apa yang telah dipersiapkan dan dibuat oleh BPUPKI, yakni mengesahkan UUD, memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta membentuk sebuah panitia yang dinamakan Komite Nasional Indonesia Pusat. Komite inilah yang pada awal-awal kemerdekaan menjadi pengawal demokrasi Indonesia. Jadi BPUPKI dan PPKI merupakan dua mata rantai yang saling mengisi dan melengkapi untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Puncak dari kegiatan dua badan ini adalah terwujudnya Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945.

Kemerdekaan Indonesia tersebut memiliki makna yuridis dan politis ideologis, yakni dengan kemerdekaan, tata hukum kolonial diganti dengan tata hukum nasional serta Indonesia membongkar tata nilai kolonial dan menggantinya dengan tata nilai nasional berdasarkan Pancasila. Kemerdekaan ini menjadi modal penting bagi bangsa Indonesia dalam mematangkan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur serta menghadapi rongrongan dan aksi kolonialisme babak kedua dari Belanda, sehingga Indonesia mampu menegakkan kedaulatannya berlandaskan pada prinsip berdiri di atas kaki sendiri.

DAFTARRUJUKAN